

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Desa Wisata

##### 1. Desa Wisata

Keberadaan desa wisata memberikan manfaat signifikan bagi para pekerja serta masyarakat yang terlibat di dalamnya. Sebagai sektor dengan daya penggerak yang besar, pariwisata dapat memicu perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, budaya, dan sosial. Di sisi, pariwisata berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik melalui peluang kerja di industri pariwisata maupun dengan mengembangkan sektor kerajinan lokal.<sup>22</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata didefinisikan sebagai berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah, serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, dan pengusaha.<sup>23</sup>

Perkembangan sektor pariwisata mencakup berbagai konsep seperti pembangunan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism development*), wisata desa (*village tourism*), dan ekowisata (*ecotourism*). Konsep-konsep

---

<sup>22</sup> Ni Desak Made Santi Diwyarthi et al. 2022, “Desa Wisata Membangun Desa Dengan Pariwisata. Penulis : Editor,”, www.ppb.ac.id.hal.1

<sup>23</sup> Dra. Mulyati. Tatik , MM. Dr. Ir.Susilo.Hendro. dan dkk, 2022. “Membangun Desa Wisata Sinergi Antara Potensi Dan Pemberdayaan,” Penerbit Lakeisha,

ini diterapkan untuk memastikan bahwa kegiatan pariwisata dapat berlangsung di wilayah tujuan wisata di luar kawasan perkotaan. Salah satu pendekatan wisata alternatif yang diterapkan adalah desa wisata, yang bertujuan untuk mendukung pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dalam sektor pariwisata.<sup>24</sup>

Desa wisata adalah wilayah pedesaan yang menawarkan pengalaman wisata otentik dengan memanfaatkan potensi lokal seperti budaya, adat istiadat, arsitektur, dan lingkungan alam. Potensi ini kemudian dikembangkan untuk menarik wisatawan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.<sup>25</sup>

## 2. Karakteristik Desa Wisata

Desa wisata memiliki ciri khas yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakatnya. Hal ini tercermin dalam berbagai aspek seperti arsitektur, warisan budaya, serta pengalaman unik dan eksotis yang khas.

Peningkatan kualitas produk wisata desa dapat dicapai melalui pemberdayaan pengusaha lokal dan pelestarian keaslian daerah, yang tercermin dalam kualitas produk, orisinalitas, keunikan, ciri khas daerah, dan kebanggaan masyarakat. Aspek-aspek ini juga tercermin dalam gaya hidup dan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam perilaku, integritas, keramahan, dan kesungguhan penduduk. Desa wisata menawarkan

---

<sup>24</sup> Igna Wiryanata. 2022. “*Desa Wisata: Pengelolaan Berbasis Budaya Dan Kinerja Keuangan*,” <http://repo.ppb.ac.id/148/1/Buku Desa Wisata.pdf>, hal. 16

<sup>25</sup> Putu Oka Prasiasa. Dewa. Ayu Diyah Sri Widari. Dewa., “Desa Wisata Potensi Dan Strategi Pengembangan” (Bali: Pustaka Larasan, 2017). Hal 11.

kombinasi unik antara budaya, kehidupan sehari-hari masyarakat, atraksi wisata, dan fasilitas pendukung, yang semuanya terjalin erat dalam kehidupan budaya masyarakat, tercermin dalam adat istiadat, budaya, dan tradisi yang masih hidup dan dipraktikkan. Untuk menjadi desa wisata yang ideal, sebuah desa setidaknya harus memiliki beberapa kriteria yakni;<sup>26</sup> ketersediaan fasilitas dan akomodasi tradisional yang memadai, atraksi wisata beragam dan menarik, penghormatan adat istiadat dan keyakinan masyarakat, serta kondisi alam yang terjaga.

### 3. Pengembangan Desa Wisata

Terminologi Community Based Tourism atau Pariwisata Berbasis Masyarakat mulai dikenal sejak tahun 1990-an. Secara lebih spesifik, pada tahun 1995 Kementerian Pariwisata Indonesia memperkenalkan konsep ini kepada publik, sehingga popularitasnya semakin berkembang. Hingga tahun 2017, model pariwisata tersebut diakui sebagai salah satu katalisator penting dalam mendorong pembangunan di Indonesia.<sup>27</sup>

Konsep pariwisata berbasis masyarakat umumnya dipahami sebagai bentuk pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai pihak yang memiliki kendali utama dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata. Dalam praktiknya, masyarakat lokal didorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan pariwisata di wilayahnya dengan tetap menjaga keberlanjutan aspek budaya, sosial, dan lingkungan. Dari pengertian tersebut, bahwa terdapat dua kata kunci penting dalam pariwisata

---

<sup>26</sup> Wiryanata, 2022. “Desa Wisata: Pengelolaan Berbasis Budaya Dan Kinerja Keuangan.” Hal 17

<sup>27</sup> I. N. D. (Ed.) Putra, *Pariwisata Berbasis Masyarakat Model Bali* (Buku Arti, 2015).

berbasis masyarakat, yakni pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat.<sup>28</sup>

Pengembangan desa wisata memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat setempat, terutama dalam beberapa bidang:<sup>29</sup>

- 1) Ekonomi: Desa wisata berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja serta membuka peluang usaha baru.
- 2) Politik: Desa wisata dapat menjadi jembatan perdamaian antar bangsa melalui pertukaran budaya, serta memperkuat persatuan dan kesatuan nasional.
- 3) Pendidikan: Desa wisata dapat memperluas wawasan dan cara berpikir masyarakat desa, serta meningkatkan kesadaran akan hidup bersih dan sehat.
- 4) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek): Desa wisata dapat mendorong peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pariwisata.
- 5) Budaya: Desa wisata berkontribusi dalam menghidupkan kembali serta menjaga keberlanjutan seni dan budaya lokal yang terancam punah.
- 6) Lingkungan: Desa wisata dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan.

Desa Wisata bertujuan memberdayakan masyarakat agar aktif berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata, menjadi subjek penting

---

<sup>28</sup> Yudha Eka Nugraha, *Pariwisata Berbasis Masyarakat Konsep Dan Praktik*, Pena Persada, 2021, <http://dx.doi.org/10.31237/osf.io/m6qpk>. Hal.1-2

<sup>29</sup> Wiryanata, "Desa Wisata: Pengelolaan Berbasis Budaya Dan Kinerja Keuangan." Hal 20

dalam pembangunan pariwisata, menjalin kemitraan yang baik dengan berbagai pihak, meningkatkan kesadaran masyarakat akan potensi wisata daerahnya, menumbuhkan sikap positif terhadap pariwisata melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona, serta berperan aktif dalam mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian potensi daya tarik wisata.

## B. Kesejahteraan Masyarakat

### 1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan adalah kondisi di mana seseorang terbebas dari kemiskinan, ketidaktahuan, rasa takut, serta kekhawatiran, sehingga dapat menjalani kehidupan yang aman, tenteram, dan sejahtera, baik secara fisik maupun mental.<sup>30</sup> Kesejahteraan adalah keadaan ideal di mana individu atau masyarakat merasa hidupnya berkecukupan, berpengetahuan, aman, dan tenteram. Kondisi ini tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan materi seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga kebutuhan non-materi seperti pendidikan, kesehatan, rasa aman, dan kebahagiaan.<sup>31</sup>

Sektor pariwisata berperan dalam menciptakan peluang bisnis yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial. Dari segi ekonomi, industri ini membuka lapangan pekerjaan baru dan menghasilkan pendapatan dari wisatawan. Pendapatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa, meningkatkan kualitas hidup, serta menekan angka kemiskinan. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kualitas

---

<sup>30</sup> Ketut Surya Diarta Pitana, 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset. Hal 186

<sup>31</sup> Adi Fahrudin, 2014. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama. H.8

hidup masyarakat yang mencerminkan tingkat kesejahteraan mereka, yang dinilai berdasarkan standar kehidupan yang ada dimasyarakat.<sup>32</sup>

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kualitas hidup masyarakat yang mencerminkan tingkat kesejahteraan mereka, yang dinilai berdasarkan standar kehidupan yang ada dimasyarakat. Kesejahteraan masyarakat mencerminkan tingkat keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kualitas hidup, yang diukur melalui:

- 1) Pemenuhan kebutuhan dasar yang merata: Aksesibilitas dan distribusi yang adil terhadap kebutuhan pokok seperti pangan, perumahan, kesehatan, dan keamanan.
- 2) Peningkatan kualitas hidup secara multidimensi: Peningkatan standar hidup, pendapatan, kualitas pendidikan, serta perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan.
- 3) Pengembangan kapasitas ekonomi dan kebebasan sosial: Perluasan peluang ekonomi dan peningkatan pilihan sosial yang tersedia bagi individu dan masyarakat.

## 2. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat

- 1) Faktor internal keluarga.
  - a) Jumlah anggota Keluarga: keluarga besar dapat menghadapi keterbatasan sumber daya seperti ruang, makanan, atau akses ke pendidikan dan kesehatan, yang dapat memengaruhi kualitas hidup

---

<sup>32</sup> Galih Kusumah, “Menggali Potensi Pariwisata Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial,” Universitas Pendidikan Indonesia - Magister Pariwisata, 2023, <https://mpar.upi.edu/menggali-potensi-pariwisata-untuk-meningkatkan-kesejahteraan-sosial/>. Diakses 22 Januari 2025

dan kesejahteraan anggota keluarga.

- b) Tempat tinggal: tempat tinggal yang nyaman dan teratur dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, sementara rumah yang tidak teratur dapat berdampak negatif pada suasana hati dan kenyamanan anggota keluarga.
- c) Keadaan sosial ekonomi: keluarga yang harmonis ditandai dengan hubungan yang baik, tulus, dan dilandasi kasih sayang antar anggota keluarga.
- d) Keadaan ekonomi: pengelolaan keuangan dan sumber daya yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan hidup seluruh anggota keluarga. Semakin banyak sumber pendapatan, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan yang dapat dicapai.

## 2) Faktor eksternal

Kesejahteraan keluarga adalah hal yang penting untuk dijaga dan ditingkatkan. Menjaga ketenangan dalam keluarga sangat penting untuk mempertahankan keharmonisan dan kesejahteraan bersama. Ketidakstabilan emosional dan keresahan batin dalam keluarga dapat berasal dari faktor eksternal, di antaranya faktor manusia, seperti kecemburuan, fitnah, ancaman fisik, dan pelanggaran norma sosial; faktor alam, seperti bencana, kerusuhan, dan penyebaran penyakit, serta faktor nilai kehidupan yang mencerminkan aspek-aspek fundamental dalam kehidupan seseorang. Faktor tujuan hidup yaitu sesuatu yang diperjuangkan agar nilai dapat tercapai, dan Faktor standar hidup yaitu

tingkatan hidup yang ingin dicapai dalam memenuhi kebutuhan.<sup>33</sup>

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, bahwa faktor-faktor yang memengaruhi kesejahteraan keluarga meliputi faktor internal dan eksternal yang dapat memicu gejolak jiwa dan ketidaktentraman batin anggota keluarga. Struktur ekonomi sektoral dan kondisi sosial ekonomi rumah tangga atau masyarakat berperan dalam menentukan kesejahteraan, yang jika tidak seimbang dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi.

### 3. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur menggunakan berbagai indikator yang menunjukkan tingkat pencapaian masyarakat. Indikator ini membantu menentukan apakah suatu masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan beberapa indikator sebagai acuan dalam pengukuran kesejahteraan, di antaranya:<sup>34</sup>

- a) Kependudukan
- b) Kesehatan dan Gizi
- c) Pendidikan
- d) Ketenagakerjaan
- e) Taraf dan Pola Konsumsi
- f) Perumahan dan Lingkungan
- g) Kemiskinan

---

<sup>33</sup> Bery Okta, 2021. "Analisis Peranan Objek Wisata Kebun Raya Liwa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)." hal. 17

<sup>34</sup> Riyadi. 2015. *Indikator Kesejahteraan Rakyat (Welfare Indicators)*.

### h) Akses terhadap Keamanan, Keadilan dan Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan tinjauan berbagai definisi, dapat dirumuskan bahwa indikator kesejahteraan mencakup:

#### 1) Kependudukan

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), aspek kependudukan merupakan indikator penting dalam memahami dinamika pembangunan suatu wilayah. Pemantauan kependudukan dilakukan dengan memperhatikan tiga elemen utama, yaitu pertumbuhan populasi, distribusi penduduk, dan struktur usia. Pertumbuhan populasi menjadi cerminan dari laju peningkatan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh angka kelahiran, kematian, serta migrasi. Informasi ini sangat berguna untuk menilai kebutuhan layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan.<sup>35</sup>

#### 2) Taraf dan Pola Konsumsi

##### a. Tingkat Pendapatan

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan pendapatan sebagai total penghasilan yang diterima individu, baik dari sektor formal maupun informal, dalam periode waktu tertentu. Secara rinci, BPS mengklasifikasikan pendapatan sebagai penerimaan moneter yang diperoleh dari hasil kerja atau usaha. Selanjutnya, indikator

---

<sup>35</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), “Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin,” [Https://Www.Bps.Go.Id](https://Www.Bps.Go.Id), 2024, <https://www.bps.go.id/assets/statistics-table/3/WVc0MGEyMXBkVFUxY25KeE9HdDZkbTQzWkVkb1p6MDkjMw==/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin--2023.html?year=2023%0Afile:///C:/Users/sigit/Downloads/Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jeni>.

pendapatan dikategorikan menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- a) Tingkat pendapatan tinggi: penghasilan di atas Rp 5.000.000.
- b) Tingkat pendapatan menengah: penghasilan antara Rp 1.000.000 hingga Rp 5.000.000.
- c) Tingkat pendapatan rendah: penghasilan di bawah Rp 1.000.000.

b. Komposisi Pengeluaran

Pengeluaran masyarakat dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu belanja untuk kebutuhan pangan dan kebutuhan non-pangan. Rasio antara kedua jenis pengeluaran ini sering digunakan sebagai indikator tingkat kesejahteraan atau ketahanan pangan suatu rumah tangga. Semakin besar proporsi pengeluaran yang dialokasikan untuk pangan, semakin mengindikasikan tingkat kesejahteraan atau ketahanan pangan rumah tangga yang rendah atau rentan.

### 3) Pendidikan

Badan Pusat Statistik (BPS) mengidentifikasi beberapa indikator kunci untuk mengukur tingkat pendidikan suatu wilayah, antara lain: angka melek huruf, angka partisipasi sekolah, tingkat pendidikan yang diselesaikan, dan angka putus sekolah. Peningkatan tingkat pendidikan yang diselesaikan dan penurunan angka putus sekolah mengindikasikan kemajuan pendidikan dan berkorelasi positif dengan kesejahteraan daerah, yang dapat dipengaruhi oleh distribusi bantuan pemerintah yang merata. Angka partisipasi sekolah, sebagai salah satu indikator, mencerminkan kemampuan sistem pendidikan dalam menjangkau

penduduk usia sekolah, dengan mempertimbangkan perubahan demografis, terutama pada populasi muda.

4) Kesehatan dan Gizi

Kesehatan didefinisikan sebagai kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan individu untuk berpartisipasi secara produktif dalam kegiatan ekonomi. Indikator kesejahteraan yang terkait dengan kesehatan mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan layanan kesehatan sehari-hari. Dalam konteks statistik, pengeluaran kesehatan dikategorikan sebagai bagian dari konsumsi rumah tangga. Berikut adalah konsep dan definisi kesehatan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS):

- a) Kelurahan kesehatan
- b) Proses kelahiran
- c) Kelahiran
- d) Penolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan
- e) Imunisasi
- f) Asi
- g) Mengobati sendiri
- h) Obat tradisional
- i) Berobat jalan
- j) Tidak termasuk dalam berobat jalan
- k) Rawat inap

5) Ketenagakerjaan

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan indikator-indikator utama seperti Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), serta tingkat upah untuk menggambarkan sejauh mana tenaga kerja tersedia dan dapat terserap oleh ekonomi. Penduduk usia kerja, yaitu mereka yang berumur 15 tahun ke atas, dibagi menjadi dua kelompok besar: mereka yang tergolong “angkatan kerja”, dan mereka yang bukan angkatan kerja (misalnya karena sekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lain selain bekerja atau mencari kerja).

Tingkat upah, sebagai variabel yang mengukur imbalan pekerja, menjadi penting dalam aspek kesejahteraan pekerja. Dengan rata-rata upah sebagai tolok ukur, dapat melihat apakah pekerjaan yang tersedia memadai untuk mendukung kebutuhan hidup, mengukur ketimpangan, dan menilai seberapa adil distribusi manfaat dari kegiatan ekonomi.<sup>36</sup>

## 6) Perumahan dan Lingkungan

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan perumahan yang layak sebagai hunian yang memiliki struktur bangunan yang kokoh, meliputi dinding, lantai, dan atap yang berkualitas. Kriteria kelayakan bangunan juga mencakup luas lantai minimal 10 m<sup>2</sup>, penggunaan material non-tanah untuk lantai, serta status kepemilikan rumah sendiri. Dalam konteks statistik, perumahan dikategorikan sebagai bagian dari konsumsi rumah tangga, dengan fokus pada aspek-aspek seperti kondisi

---

<sup>36</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), “*Konsep Dan Definisi*” Dalam Publikasi Indikator Ketenagakerjaan Seperti Dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). (BPS, 2023).

fisik bangunan dan status kepemilikan.<sup>37</sup>

Kondisi lingkungan sekitar juga menjadi indikator penting, mencakup pengelolaan sampah, kualitas udara, ruang terbuka hijau, serta tingkat kebersihan lingkungan pemukiman. Lingkungan yang sehat dan bersih tidak hanya mendukung kesehatan fisik masyarakat, tetapi juga menciptakan kenyamanan dan kualitas hidup yang lebih baik. Dengan demikian, indikator perumahan dan lingkungan yang ditetapkan BPS mencerminkan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga dari kualitas tempat tinggal dan kondisi lingkungan yang mendukung kehidupan yang layak, sehat, dan berkelanjutan.

#### 7) Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, kemiskinan dipahami sebagai kondisi ketika individu atau rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan, baik dari sisi ekonomi maupun sosial.

BPS menggunakan pendekatan garis kemiskinan untuk menentukan status miskin, yang terdiri atas garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non-makanan (GKNM). GKM mencerminkan pengeluaran minimum untuk mencukupi kebutuhan konsumsi kalori sebesar 2.100 kkal per kapita per hari, sedangkan GKNM mencakup

---

<sup>37</sup> Riyadi, *Indik. Kesejaht. Rakyat (Welfare Indic. 2015).*

kebutuhan dasar lainnya seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

Selain pengukuran melalui garis kemiskinan, BPS juga memperhatikan indikator-indikator sosial ekonomi lainnya, seperti tingkat pengangguran, akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, kondisi perumahan, serta kepemilikan aset dan fasilitas rumah tangga. Dengan demikian, tingkat kemiskinan tidak hanya dilihat dari aspek pendapatan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat dalam mengakses berbagai kebutuhan dasar yang menentukan kesejahteraan hidup secara menyeluruh.<sup>38</sup>

#### 8) Akses terhadap Keamanan, Keadilan dan Partisipasi Masyarakat

Menurut kerangka teori Badan Pusat Statistik (BPS), aspek sosial lainnya menjadi salah satu dimensi penting dalam menilai kesejahteraan masyarakat karena mencakup kualitas kehidupan sosial secara lebih luas di luar pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dimensi ini meliputi akses terhadap keadilan yang menjamin hak setiap individu secara adil tanpa diskriminasi, keamanan yang memastikan masyarakat dapat hidup tenteram dan produktif tanpa ancaman kriminalitas atau konflik, serta partisipasi masyarakat yang mencerminkan kepedulian, solidaritas, dan keterlibatan aktif dalam pembangunan sosial, budaya, maupun politik. Keseluruhan indikator tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan sejati tidak hanya diukur dari kondisi material, tetapi juga dari keadilan, rasa

---

<sup>38</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024*.

aman, dan peran aktif masyarakat sebagai pilar penting bagi terciptanya kehidupan yang inklusif, harmonis, dan berkelanjutan.<sup>39</sup>

#### 4. Kesejahteraan Perspektif Ekonomi Islam

Dalam perspektif Islam, kesejahteraan dipahami melalui konsep *falah*, yaitu kondisi sejahtera yang bersifat holistik dan mencakup keseimbangan antara aspek material maupun spiritual, individu maupun sosial, serta kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kesejahteraan duniawi sendiri dimaknai sebagai terpenuhinya kebutuhan yang menghadirkan kenikmatan hidup, baik secara fisik, intelektual, biologis, maupun material. Sementara itu, kesejahteraan akhirat diartikan sebagai bentuk kenikmatan yang akan dirasakan manusia setelah meninggalkan kehidupan di dunia.<sup>40</sup>

*Falah* berasal dari bahasa Arab, dari kata kerja *aflaha–yuflihu* yang bermakna keberhasilan, kemuliaan, atau kemenangan. Secara harfiah, *falah* dipahami sebagai kejayaan dan kebahagiaan hidup. Konsep ini tidak hanya merujuk pada kesejahteraan lahiriah, tetapi juga mencakup ketenteraman batin, kesenangan duniawi dan ukhrawi, serta keseimbangan antara aspek material dan immaterial. Dalam ajaran Islam, istilah *falah* diambil dari Al-Qur'an yang kerap dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang, baik di dunia maupun di akhirat, sehingga lebih menekankan dimensi spiritual dibanding sekadar material. Dengan demikian, *falah* dipandang sebagai konsep multidimensi yang berimplikasi pada perilaku individu (mikro) maupun kehidupan kolektif

---

<sup>39</sup> Badan Pusat Statistik (BPS).

<sup>40</sup> M.Ag Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, *Falsafah Ekonomi Syariah*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2020).

(makro).<sup>41</sup>

Dalam perspektif syariah, terdapat tiga sudut pandang utama dalam memahami kesejahteraan ekonomi. Yaitu:

- 1) Dari sisi pengertian, istilah sejahtera sebagaimana tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mencakup keadaan aman, sentosa, damai, makmur, serta terbebas dari berbagai gangguan dan kesulitan. Makna ini sejalan dengan pengertian “Islam” yang berarti keselamatan, kedamaian, dan ketenteraman. Dengan demikian, kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari misi Islam, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah pada Q.S. Al-Anbiya’ ayat 107 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*Artinya “Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”*<sup>42</sup>

- 2) Dari sisi kandungan ajaran, seluruh aspek Islam senantiasa berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Hubungan dengan Allah SWT (*hablumminallah*) harus berjalan seiring dengan hubungan baik antar manusia (*hablumminannas*). Demikian pula, perintah beriman selalu diiringi dengan amal shalih, termasuk upaya mewujudkan kesejahteraan sosial. Rukun Islam seperti syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji juga memiliki dimensi sosial yang kuat dalam menciptakan kemaslahatan

---

<sup>41</sup> Mudiningsih Eka, “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kawasan Objek Wisata Alam Gunung Kelud Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Sugihwaras Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri.” H. 26

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, ((Bandung: Penerbit Diponegoro, 1994),508., n.d.).

bersama.

3) Dari sisi implementasi, usaha mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan bagian dari misi kekhilafahan manusia sejak Nabi Adam As. Sebagaimana dijelaskan H.M. Quraish Shihab dalam Wawasan Al-Qur'an, gambaran kesejahteraan sosial ideal telah ditunjukkan melalui kisah kehidupan Nabi Adam danistrinya di surga sebelum diturunkan ke bumi untuk menjalankan amanah sebagai khalifah.<sup>43</sup>

Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa konsep kesejahteraan secara umum berkaitan erat dengan pemeliharaan lima tujuan pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta. Pemeliharaan kelima tujuan ini terbagi dalam beberapa tingkatan kebutuhan, meliputi:<sup>44</sup>

- a) Kebutuhan primer (*dharuriyah*), seperti pangan, sandang, dan papan.
- b) Kebutuhan sekunder (*hajiyah*), yakni berbagai hal yang meskipun tidak bersifat vital, tetap diperlukan untuk meminimalisasi kesulitan dalam kehidupan.
- c) Kebutuhan tersier (*tahsiniyah*), yang mencakup aspek pelengkap dan penyempurna kehidupan, sehingga memberikan kenyamanan, keindahan, dan kualitas hidup yang lebih baik.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kesejahteraan tidak hanya berfokus pada pembangunan material individu, masyarakat, maupun negara, tetapi juga menekankan pengembangan aspek-aspek lain yang menjadi elemen penting bagi kehidupan sejahtera dan bahagia. Al-Qur'an menegaskan bahwa

---

<sup>43</sup> Ikhwan Abidin Basri, *Islam Dan Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Gema Pers, 2005). h. 85-87

<sup>44</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).h. 62

kesejahteraan sejati berawal dari individu yang memiliki tauhid kuat, tercukupi kebutuhan dasarnya tanpa berlebih-lebihan, sehingga tercipta kondisi yang aman, tenteram, dan penuh kenyamanan.